

Pengembangan Sikap Tanggung Jawab Sosial dalam Rangka Mengimplementasikan Wawasan Pengetahuan melalui Internalisasi Pendidikan Karakter

Ni Ketut Sari Adnyani^{1*}, Ni Nyoman Mandriani², dan Ni Kadek Putus Asrini³

¹Jurusan Ilmu Hukum FHIS Undiksha, Singaraja,

²SD Negeri 2 Datah, Amlapura,

³SD Negeri 6 Tianyar, Amlapura

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pentingnya Pendidikan Karakter diberikan kepada peserta didik; (2) untuk mengetahui relevansi Pendidikan Karakter dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial bagi peserta didik; dan (3) untuk mengetahui internalisasi Pendidikan Karakter dalam memperkaya khasanah pengetahuan peserta didik dalam rangka menumbuhkan sikap positif mengisi kemerdekaan. Metode penelitian, Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Pendidikan (Educational Research and Development). Proses pengembangan dan validasi produk pendidikan dalam penelitian ini adalah berupa pengembangan model pembelajaran nasionalisme berbasis local genius. Penelitian pada tahap Define dan design ini dilakukan pada setting penelitian: pendidik, sekolah, siswa dan perpustakaan. Tahap development, yaitu uji coba terbatas sesuai dengan desainnya akan dilakukan di SD Negeri 2 Datah dan SD Negeri 6 Tianyar dengan menggunakan setting kelas-kelas dalam pembelajaran PKn. Kelas-kelas mata pelajaran PKn yang dilibatkan pada tahap development dipilih secara purposive (bertujuan) sesuai fokus penelitian. Penentuan sampel penelitian pada uji coba dilakukan secara random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Karakter diberikan kepada peserta didik, relevansinya berpengaruh terhadap sikap tanggung jawab sosial siswa.

Keywords:

*Internalisasi,
Pendidikan Karakter,
sikap tanggung jawab
sosial*

PENDAHULUAN

Nasionalisme merupakan jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan demi bangsa dan negara (Ernes Renan, 1990). Nasionalisme terbangun ketika adanya penjajahan/imperialisme dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta penjajahan fisik. Bangun nasionalisme Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928, oleh para pemuda yang menyatakan sumpah untuk berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia, bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia dan berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia telah dibuktikan dengan adanya perlawanan bangsa Indonesia secara besar-besaran dengan mengorbankan harta benda dan nyawa. Terjadinya pertempuran di Surabaya yang dikenal dengan pertempuran

Surabaya (Nopember, 1945), pertempuran Medan area (Oktober 1945), Palagan Ambarawa (Nopember 1945), Bandung lautan api (Maret 1946), perang puputan Margarana di Bali (Nopember 1946) dan berbagai perlawanan lainnya merupakan bukti kongkrit nasionalisme rakyat Indonesia. Ketika penjajahan fisik telah meninggalkan Indonesia, maka nasionalisme akan mengalami pergeseran makna dan bentuk perjuangannya, bahkan tak jarang justru mengalami keputaran/kemunduran jika tidak diinternalisasi, dipupuk, dirawat, dikembangkan dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Suherni, 2016 dan Alwasilah, 2013).

Secara faktual, kondisi ini memang menjadi kenyataan pada masyarakat Indonesia, yang saat ini sedang dihadapkan pada tantangan yang amat berat berkaitan dengan memudarnya rasa nasionalisme

* Corresponding author.

E-mail Addresses: - niktsariadnyani@gmail.com (Ni Ketut Sari Adnyani)

dan terjadinya degradasi moral. Adanya gerakan radikalisme, berkembangnya organisasi yang menginginkan negara agama dan gerakan teorisme yang terjadi di bergai daerah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa merupakan bukti kongkrit melunturnya nasionalisme (Suastika, 2014).

Persoalan ini terjadi disebabkan karena belum berfungsinya secara maksimal piranti-piranti sosial yang ada di masyarakat, termasuk piranti pendidikan. Proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam praktek pendidikan belum diterjadikan secara maksimal. Praktik pendidikan yang dilangsungkan pada jenjang Sekolah Dasar sampai jenjang Pendidikan Tinggi dinilai belum mampu membangun secara utuh semangat nasionalisme pada setiap urat nadi anak didik. Sejalan dengan temuan penelitian Deny, (2009: iii) tentang integritas dalam pembentukan identitas bangsa untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan di Kota Medan, menunjukkan hasil pembelajaran PKn dan Sejarah masih berorientasi pada kemampuan kognitif dengan mengabaikan nilai-nilai nasionalisme yang semestinya menjadi kunci keberhasilan PKn dan Sejarah. Proses pembelajaran lebih banyak diupayakan pada pengembangan penguasaan materi, tanpa dibarengi dengan proses pengkajian yang bersifat kontekstual empirik tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti berkembangnya paham radikalisme, terorisme, konflik antar etnis, berkembangnya politik identitas yang membahayakan bangsa dan negara, penjajahan intelektual, penjajangan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan sumber daya manusia dan penjajangan identitas kebangsaan (Winataputra, 2013). Sementara masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai lokal yang kuat untuk membangun rasa nasionalisme.

Permasalahan umum penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan model pembelajaran nasionalisme berbasis lokal genius dalam mata pelajaran PKn ditingkat Sekolah Dasar . Secara rinci masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu (1) Bagaimanakah kondisi pembelajaran PKn di SD?, (2) Bagaimanakah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan nasionalisme siswa SD dalam praktek pembelajaran PKn selama ini ?, (3) Bagaimanakah motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn di SD di Kabupaten Karangasem?

Urgensi pendidikan nasionalisme secara yuridis terlegitimasi lewat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini mengisyaratkan pentingnya pembentukan karakter dan jatidiri bangsa dalam proses pendidikan, sehingga terbangun rasa banga pada bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan akan bangsa dan negara akan menjadi sarana untuk memperkuat tali persudaraan, kebersamaan dan rasa saling memiliki antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Sehingga memunculkan komitmen untuk bersatu, walaupun terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, daerah dan golongan. Secara fakual kondisi ini masih jauh dengan yang diharapkan, adanya ekstrakurikuler keagamaan, adanya kewajiban untuk menggunakan pakaian adat daerah tertentu di sekolah yang siswanya dominandari satu daerah dan terjadinya penyeragaman dalam berbagai dimensi pada sekolah merupakan bentuk dikriminasi dalam prkatek pendidikan yang berimplikasi pada sikap dan prilaku siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kompas, 27 Agustus 2016). Kondisi ini berkorelasi dengan gejala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menunjukkan semakin rendahnya kesadaran dan kecintaan terhadap Indonesia (Winataputra, 2013; Sapriya, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan pendidikan (*Educational Research and Development*). Proses pengembangan dan validasi produk pendidikan dalam penelitian ini adalah berupa pengembangan model pembelajaran nasionalisme berbasis lokal genius (Borg and Gall, 1989). Adapun tahapan tersebut adalah *define, design, development, dan dissemination* (Thiagarajan *et al*, 1974).

Penelitian pada tahap *Define* dan *design* ini dilakukan di Kabupaten Karangasem pada setting penelitian: pendidik, sekolah, siswa dan perpustakaan atau pusat dokumentasi. Sedangkan pada tahap *development*, yaitu uji coba terbatas sesuai dengan desainnya akan dilakukan di sekolah, yaitu SD N 2 Datah, dan SD N 6 Tianyar dengan menggunakan setting kelas-kelas pada saat kegiatan pembelajaran PKn berlangsung. Kelas-kelas yang dijadikan sampel untuk mata pelajaran PKn yang dilibatkan pada tahap *development* dipilih secara *purposive* (bertujuan) sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam melaksanakan pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, guru perlu mengembangkan startegi/taktik yang tepat, dengan pendekatan-pendekatan dan mode-model belajar yang akan diterapkan serta didukung oleh metode dan media yang efektif. Hal ini akan membantu guru dalam memahami dan membantu siswa untuk berlatih mengamalkan nilai moral Pancasila dan budi pekerti yang dipelajari di

sekolah. Dari sekian banyak pendekatan dan model serta metode pembelajaran, perlu dipilih beberapa pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa Sekolah Dasar (SD) serta sifat tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran PKn di SD.

Ada empat teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian tahap pertama dan kedua (*define* dan *design*) ini, yaitu pengumpulan data melalui kajian dokumen, melalui wawancara mendalam, observasi dan *focus group discusstion*. Untuk studi dokumen, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman dan format studi/analisis dokumen.

Untuk studi melalui wawancara mendalam, peneliti mengembangkan pedoman wawancara secara mendalam yang tidak terstruktur (Miles and Huberman, 1992). Untuk observasi, peneliti mengembangkan pedoman observasi tidak terstruktur berkaitan dengan berbagai aktivitas pembelajaran di kelas dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk *focus group discusstion* instrument yang digunakan adalah format *focus group discusstion* yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Untuk penelitian tahap ketiga (*development*), pengumpulan data utama untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar nasionalisme siswa dilakukan melalui tes objektif pilihan ganda tentang pengetahuan nasionalisme, untuk sikap nasionalisme siswa diperoleh melalui evaluasi diri sikap nasionalisme, dan pemberian format observasi tentang perilaku nasionalisme yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis sumber dan data yang diperoleh. Untuk analisis data tahap *define* dan *design* dilakukan secara kualitatif, yaitu mengkatagori dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendekatan dalam pembelajaran PKn pada prinsipnya lebih mengarah kepada pengembangan kurikulum atau pengorganisasian isi materi pelajaran. Ada delapan pendekatan, yang menurut Douglas Suparka (dalam Martorella, 1996) dapat digunakan dalam pembelajaran PKn, yaitu: 1. Evokasi (kesempatan), pendekatan ini menekankan pada inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. Pendekatan ini sering dihadapkan pada kendala kultural dan psikologikal, terutama pada masyarakat yang masih eksklusif. 2. Inkulkasi (menanamkan), pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah tersusun oleh guru. Tujuannya untuk mempengaruhi dan mengarahkan siswa pada simpulan nilai yang sudah direncanakan. 3. Kesadaran, adalah bagaimana mengungkap dan membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau orang lain. Kesadaran itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang menumbuhkan kesadaran tentang nilai atau seperangkat nilai tertentu. 4. Penalaran moral, dimana siswa dilibatkan dalam dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan-alasan moral yang rasional. 5. Analisis Nilai, suatu pendekatan yang mengajak siswa untuk mengkaji dan menganalisis nilai yang ada pada suatu media stimulus yang telah disiapkan guru dalam pembelajaran PKn. 6. Pengungkapan nilai, adalah upaya meningkatkan kesadaran diri (*self awareness*) dan memperhatikan diri sendiri, bukan pemecahan masalah. Pendekatan ini membantu siswa untuk menemukan dan memeriksa nilai mereka untuk menemukan keberartian dan rasa aman. 7. Komitmen, mengarahkan dan menekankan pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab. Terhadap pendidikan nilai dan moral. Dalam PKn yang menjadi komitmen dasarnya adalah nilai dan moral Pancasila dan UUD 1945. 8. Memadukan, menyatukan diri siswa dengan pengalaman dalam kehidupan riil yang dirancang oleh guru dalam proses pembelajaran. Proses menyatukan ini dimaksudkan agar siswa benar-benar mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman yang dirancang oleh guru melalui berbagai metode yang sesuai, seperti: metode partisipatori, simulasi, sosiodrama, studi proyek. Sebagai pendidikan nilai, dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dituntut untuk: 1. Lebih mengenali dan memahami nilai-nilai inti pribadi dan masyarakat 2. Ber-inkuiri (filosofis dan rasional) terhadap nilai-nilai tersebut 3. Mencoba dan menumbuhkan respon afektif dan emotif terhadap nilai-nilai tersebut 4. Membuat putusan tentang tindakan yang paling tepat atas dasar inkuiri dan respon. Guru perlu mempertimbangkan strategi yang tepat dalam pembelajaran PKn, dari beberapa pendekatan dan model yang akan diterapkan. Hal ini akan membantu guru dalam memahami Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan sekaligus membantu siswa untuk mengamalkan nilai moral Pancasila dan budi pekerti yang luhur, yang dipelajari di sekolah. Dari beberapa pendekatan dan model pembelajaran perlu dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna.

Untuk menjembatani pemahaman tentang hubungan antara perasaan (*feeling*), pemikiran (*though*), dan tindakan (*action*) moralitas seseorang, perlu dikembangkan model pendidikan moral yang efektif. Semua model pembelajaran PKn biasanya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan proses yang terpisah antara caring, judging dan acting. Pemahaman secara umum terhadap ketiga proses tersebut (*caring, judging, acting*) akan membantu seorang guru dalam memahami model belajar secara efektif, yaitu: 1. Caring (perhatian), adalah istilah yang menunjukkan perilaku seseorang untuk menolong atau memperhatikan orang lain. Seseorang yang terdorong untuk membantu, memperhatikan dan memikirkan orang lain berarti juga memperhatikan kebutuhan atau minat atau perhatian orang lain yang membangkitkan kepedulian terhadap orang lain. Istilah itu juga mengandung suatu tingkat pemahaman social dan psikologikal tertentu. Memperhatikan dengan menolong orang lain yang didorong oleh suatu tingkat perasaan tertentu sebenarnya tidak cukup dengan hanya merasakan kebutuhannya, akan tetapi hal itu juga menyangkut kemampuan untuk mengetahui dan menyimpulkan kebutuhan dan minat orang lain. 2. Judging (Pertimbangan), adalah proses menilai dan mempertimbangkan yang tidak lepas dari nalar (*reasoning*) walaupun antara keduanya harus dapat dibedakan. Dengan penalaran (*reason though*) atau pertimbangan (*judge*) sebuah moral sering menempatkan kesejahteraan orang lain menjadi tujuannya. Memang harus mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam keputusan /penalaran kita. Misalnya “membunuh seseorang demi kepentingan negara” memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan di antara berbagai bayangan tentang “baik” dengan penafsiran tandingan dengan yang “benar”.

Dalam membandingkan antara *caring* dan *judging* itu seseorang akan dihadapkan pada pertimbangan nilai (*value judgment*) yang mengandung alasan (*reasoning*). Namun sesuai dengan sifatnya, alasan tidak dapat diterapkan dalam satu kasus tertentu. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa “membunuh orang adalah salah” tetapi bagaimana halnya dengan “membunuh untuk membela diri”. Oleh karena itu pertimbangan moral memerlukan kemampuan untuk menilai minat yang saling bertentangan berdasarkan dasar/prinsip dan criteria yang konstan. 3. *Acting* (tindakan), adalah bukanlah sesuatu yang bersifat moral atau immoral, di luar dari motivasi atau pertimbangan seseorang atau tindakan tidak memiliki status moral. Apa yang membuat tindakan sebagai moral adalah kualitas perhatian/ pertimbangan yang yang memandunya. Kerapuhan, kebersihan dan kejujuran sering dianggap sebagai moral. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah alasan yang melatarbelakangi mengapa kita melakukannya. Yang penting pada dasarnya adalah niat, bukan pamer supaya mendapat pujian. Walaupun tindakan bukan sebuah kategori moral, tanpa kesempatan untuk bertindak dan merefleksikan tindakan akan menghambat terjadinya proses pengembangan moral. Yang penting bagi guru, pendidikan moral bukanlah menyejajarkan antara penyesuaian moral dengan moralitas, namun yang terpenting adalah bagaimana membantu siswa untuk memiliki otonomi moral.

Salah satu praktik pembelajaran yang disinyalir mampu menumbuhkan keterampilan nasionalisme siswa adalah melalui pembelajaran PKn. Melalui pembelajaran PKn, siswa dapat merasakan, menghayati dan mengamalkan perilaku patriotism dan nasionalisme dalam kehidupan sekolah. Siswa akan melatih kesadaran bernegara, mereflesi berdirinya berbangsa Indonesia, pengorbanan para pahlawan, bertanggungjawab pada bangsa dan negara, peduli pada masalah sosial, mencintai karya bangsa sendiri, mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa, berjuang demi bangsa dan negara serta rela berkorban demi bangsa dan negara.

Pada praktiknya pembelajaran PKn di SD N 2 Datar dan SD N 6 Tianyar masih jauh dari apa yang diharapkan. Penelitian Deny, (2009: iii) tentang integritas dalam pembentukan identitas bangsa untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, menunjukkan hasil pembelajaran PKn masih berorientasi pada kemampuan kognitif dengan mengabaikan keterampilan nasionalisme yang semestinya menjadi kunci keberhasilan pembelajaran.

Berangkat dari masalah siswa yang tidak mengikuti upacara, tidak hafal lagu-lagu Indonesia raya, tidak hafal pancasila, tidak mengibarkan bendera, tidak saling menghormati menemukan proses pembelajaran PKn pada jenjang SD masih bersifat expositoris dengan mengandalkan wibawa guru, sehingga tidak mampu merangsang minat, kreativitas dan keterampilan siswa untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang terjadi pada masyarakatnya.

Praktik pembelajaran PKn masih kering dari proses melatih dan membiasakan sikap nasionalisme dalam praktek pembelajaran. Padahal keberhasilan dari pembelajaran PKn adalah terbangunnya tanggungjawab, kegigihan perjuangan untuk mengejar cita-cita, komitmen, jujur, berjuang demi bangsa dan negara, mencintai budaya dan produk dalam negeri, menghormati otoritas negara, lambang negara, menghargai para pahlawan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Salah satu persoalan dasar dalam praktek pembelajaran PKn adalah model pembelajaran dan model evaluasi yang diterapkan guru dalam pembelajaran PKn.

Urgen dalam pengembangan sikap sosial, termasuk dalam pembelajaran PKn adalah model pembelajaran yang mengarahkan aktivitas guru dan siswa untuk mencapai kesadaran sejarah dan nasionalisme serta model evaluasi yang akan diterapkan guru yang dapat menunjang tercapainya perilaku nasionalisme siswa. Oleh karena itu, selain kemampuan dan keterampilan guru, model pembelajaran juga

akan menjadi instrumen utama dalam menentukan keberhasilan pembelajaran PKn dalam membangun sikap nasionalisme siswa.

Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh guru SD di Kabupaten Karangasem dalam mengemas mata pelajaran PKn untuk mengembangkan model belajar dan pembelajaran alternatif berbasis pada pendekatan budaya spiritual lokal masyarakat. Guru di SD N 2 Dajah dan SD N 6 Tianyar telah mengembangkan model siklus belajar *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. Hasilnya menunjukkan meningkatnya motivasi dan aktivitas siswa dalam mengembangkan sikap nasionalisme melalui implementasi nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari siswa Sekolah Dasar.

KESIMPULAN

Kondisi pembelajaran PKn di SD menyelaraskan dengan tingkat kebutuhan belajar siswa di jenjang tersebut, tahapan dan sintak pembelajaran pun dirancang sederhana menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan belajar PKn peserta didik di level SD.

Proses pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan nasionalisme siswa SD dalam praktek pembelajaran PKn selama ini melatih siswa untuk memiliki kesadaran bernegara, mereflesi berdirinya berbangsa Indonesia, pengorbanan para pahlawan, bertanggungjawab pada bangsa dan negara, peduli pada masalah sosial, mencintai karya bangsa sendiri, mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa, berjuang demi bangsa dan negara serta rela berkorban demi bangsa dan negara.

Guru di SD N 2 Dajah dan SD N 6 Tianyar telah mengembangkan model siklus belajar *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. Hasilnya menunjukkan meningkatnya motivasi dan aktivitas siswa dalam belajar PKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah Chaedar A. (2013) Policy on Foreign language education In Indonesia Internasional Journal of educations, vol. 7, No. 1.
- Borg, W. R. and M. D. Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman
- Bali Post, 16 Mei 2017; 02 Juni 2017; 09 Mei 2017.
- Deny Setiawan. (2009). *Integritas dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Kesadaran Sejarah (Disertasi)*. Bandung: UPI.
- Ernes. R. (1990). *What is A Nation? Dalam Nation dan Narration: Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Joyce, B., & Weil, M. (2009). *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kusnadi. (2006). *Pengembangan Model Pembelajaran IPS-Geografi Berbasis Tauhid. Disertasi*. Bandung: UPI.
- Maksum, H (2015) Model project citizen dalam mengembangkan sikap nasionalisme. *Research sains*, Vol 1 Mei 2015. 153-159
- Miles, B and Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohendi Rohedi. Jakarta; UI-Press.
- Nuangchalerm, P. and Thammasena, B. 2009. " Cognitive Development, Analytical Thinking and Learning Satisfaction of Second Grade Student Learned through Inquiry-based Learning " *Asian Social Science* Vol 5 No.10.
- Sopiah, P. (2009). Pengaruh Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portofolio Terhadap Pengembangan Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture). *Acta Civicus*, Vol. 2, April 2009.

Suherni, (2016). Sikap Nasionalisme Peserta Didik Pada Sma Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Makasar: Universitas Negeri Makassar.

Suhartono, (2001) *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suastika, (2014) Nasionalisme Dalam Perpektif Postmodernisme, Poststrukturalisme dan Postkolonialisme. Singaraja: Media Komunikasi FIS

Tribun News com, 10 Maret dan 16 Mei 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI

Winataputra, U. (2013) *Civic Education (Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas)*.Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.